

Penyuluhan Perpajakan (Sadar Pajak Sejak Dini) Bagi Pelajar SMA Negeri 13 Makassar

Nurmiati^{1,*}, Murbayani², Ridwan³, Ismail³, Ilham⁴, Bastian Lubis⁵, Murniati⁶

^{1,2,3,4,5}Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas, Jl. Tun Abdul Razak, 92113

⁶Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas, Jl. Tun Abdul Razak, 92113

*nurmiati@patria-artha.ac.id

ABSTRAK

Pemberian edukasi pajak sejak dini merupakan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat di Indonesia. Bagi suatu negara, generasi muda merupakan akar dari bangsa tersebut. Generasi muda menjadi potensi yang sangat besar untuk dibentuk, sehingga di masa depan nanti mereka bisa menjadi perantara yang membawa Indonesia ke puncak kejayaannya. Melalui edukasi pajak sejak dini, secara perlahan mindset positif terkait pajak akan terbentuk pada generasi muda yang nantinya akan menjadi calon wajib pajak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan pelajar SMA Negeri 13 Makassar akan pentingnya Pajak bagi negara dan masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran pelajar SMA Negeri 13 Makassar terkait perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Berkat adanya ilmu terkait perpajakan sejak dini ini para pelajar mampu memahami tujuan serta fungsi dari pajak.

Kata kunci: Sadar Pajak; Pelajar; Generasi Muda

ABSTRACT

Providing tax education from an early age is a strategy to increase tax compliance in Indonesia. For a country, the young generation is the root of the nation. The young generation has a huge potential to be formed, so that in the future they can become intermediaries who bring Indonesia to the peak of its glory. Through early tax education, a positive mindset related to taxes will slowly form in the young generation who will later become prospective taxpayers. The purpose of this activity is to increase the insight and knowledge of students of SMA Negeri 13 Makassar regarding the importance of taxes for the state and society. The result of this activity is an increase in the understanding and awareness of students of SMA Negeri 13 Makassar regarding taxation applied in Indonesia. Thanks to the knowledge related to taxation from an early age, students are able to understand the purpose and function of taxes.

Keywords: Tax Awareness, Student, Young Generation

1. PENDAHULUAN

Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada Negara yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan usaha berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007). Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa pajak bersifat wajib, tetapi tidak memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang kewajiban ini. Pajak justru ditujukan untuk kepentingan umum dengan mengoptimalkan hasil bagi penyelenggaraan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat bergantung pada pajak. Berdasarkan APBN 2020, pajak memberikan kontribusi sebesar Rp1.865,7 triliun atau 83,54% terhadap penerimaan negara, sedangkan berdasarkan APBN 2021, pajak memberikan kontribusi sebesar Rp1.743 triliun atau 82,8%. (<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/>). Indikasi diatas menunjukkan bahwa keberlangsungan kehidupan negara sangat bergantung dari sumber pendapatan pajak.

Masyarakat harus belajar tentang pajak sejak dini. Setelah itu, seluruh masyarakat harus sadar akan kewajiban mereka untuk membayar pajak dan merasakan fasilitas yang dibangun dari pendapatan pajak. Pemerintah terus memperbaiki pengurusan pajak. Sejak tahun 1983, peraturan perpajakan berubah dan memberikan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Sistem penilaian diri memungkinkan wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa, meskipun pajak bersifat memaksa, pemerintah percaya sepenuhnya pada pembayaran pajak kepada wajib pajak. Akibatnya, masyarakat harus sangat menyadari kewajibannya untuk membayar pajak.

Saat ini, masalah terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah rendahnya kesadaran wajib pajak untuk taat pajak. Untuk membuat masyarakat sadar pajak dengan mendapatkan pengetahuan tentang pajak sejak dini, diperlukan strategi dan teknis yang sistematis (2). Rasio pajak Indonesia pada tahun 2022 sebesar 10,4%, sedikit lebih tinggi dari 9,11% pada tahun 2021, tetapi masih cukup rendah dibandingkan dengan rasio pajak tahun 2008 sebesar 13,31% (<https://www.kemenkeu.go.id/>).

Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih kurang paham mengenai tujuan pengenaan pajak. Akibatnya, banyak masyarakat acuh tak acuh untuk membayar pajak. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak di Indonesia masih belum bisa dikatakan optimal. Di sinilah mengapa edukasi pajak sangat berperan penting untuk masyarakat di Indonesia, sebab masyarakat di Indonesia sangat memerlukan pengetahuan yang paten mengenai pajak, sehingga mereka bisa lebih paham mengenai pajak, baik dari segi sistem pemungutannya maupun manfaat yang akan diperoleh wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut.

Beberapa faktor menyebabkan rendahnya kesadaran perpajakan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang perpajakan dan ketidakinginan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak karena mereka terus menganggap pajak sebagai beban daripada kewajiban yang harus dipenuhi.

Penanaman kesadaran tentang pentingnya membayar pajak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran patuh pajak yang baik di masa depan. Ini terutama berlaku untuk pelajar SMA yang akan menjadi wajib pajak di masa depan dan membutuhkan pemahaman tentang perpajakan. Oleh karena itu, para dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha mengadakan program pengabdian masyarakat dengan memberikan pelatihan tentang taat pajak sejak dini. Mengingat betapa pentingnya pajak untuk pembangunan berkelanjutan Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran sukarela akan kewajiban pajak adalah dengan memberikan pelajaran pajak secara berkala dan berkelanjutan. Sasaran dari pengabdian masyarakat ini adalah pelajar SMS Negeri 13 Makassar, yang merupakan upaya untuk membangun sinergi yang apik dalam proses pembentukan kesadaran masyarakat sadar pajak.

Beberapa faktor memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan, salah satunya adalah pengetahuan dan kesadaran mereka tentang pajak. Wajib pajak yang lebih sadar tentang pajak berkontribusi pada peningkatan kepatuhan mereka terhadap pajak dan mereka yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pajak memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pajak.

Sering kali, "pengetahuan" didefinisikan sebagai bagian dari pemahaman tentang disiplin ilmu tertentu, atau pemahaman yang memungkinkan suatu persepsi. Sementara pengetahuan pajak adalah informasi tentang pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan, membuat keputusan, dan merencanakan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pajak.

Namun demikian, kesadaran pajak di Indonesia masih rendah, yang berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat dan masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah yang akan dibahas dalam kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Bagaimana cara meningkatkan kesadaran sukarela untuk membayar pajak sejak dini karena pelajar akan menjadi wajib pajak.

Setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selalu menunjukkan bahwa dana yang dikumpulkan dari pajak masyarakat akan digunakan untuk membiayainya. Oleh karena itu, masyarakat juga diharapkan menjaga fasilitas yang telah dibangun pemerintah untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, setiap warga negara harus memiliki pemahaman yang jelas tentang peran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui, APBN yang dibuat oleh pemerintah terdiri dari tiga sumber penerimaan utama:

- 1) Penerimaan dari sektor pajak;
- 2) Penerimaan dari sektor migas (Minyak dan Gas Bumi); dan
- 3) Penerimaan dari sektor bukan pajak.

Sektor pajak tampaknya merupakan sumber penerimaan terbesar negara dari ketiga sumber penerimaan di atas. Kita dapat melihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun dan memberi andil yang signifikan dalam pendapatan negara. Selama bertahun-tahun, dikatakan bahwa sektor pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Mengingat sifat sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (sumber daya yang tidak dapat diperbaharui), maka penerimaan dari migas sekarang tidak dapat diharapkan lagi menjadi sumber keuangan negara yang konstan. Sebaliknya, pajak selalu dapat diperbaharui sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. Namun, penerimaan negara bukan pajak adalah pengelolaan keuangan negara yang memberikan kemandirian negara.

Sering kali, "pengetahuan" didefinisikan sebagai bagian dari pemahaman tentang disiplin ilmu tertentu, atau pemahaman yang memungkinkan suatu persepsi. Sementara pengetahuan pajak adalah informasi tentang pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan, membuat keputusan, dan merencanakan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pajak.

Namun demikian, kesadaran pajak di Indonesia masih rendah, yang berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat dan masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah yang akan dibahas dalam kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Bagaimana cara meningkatkan kesadaran sukarela untuk membayar pajak sejak dini karena pelajar akan menjadi wajib pajak.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dikenal sebagai pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, masalah pembiayaan pembangunan harus sangat diperhatikan. Di Indonesia sendiri, lebih dari 80% pendapatan Negara Republik Indonesia berasal dari pajak. APBN yang baik biasanya menghasilkan lebih banyak dari pajak daripada dari pengelolaan sumber daya alam. Ini karena salah satu fungsi pajak adalah untuk menjaga stabilitas, memberikan pemerintah dana untuk menerapkan kebijakan stabilitas harga untuk mengontrol inflasi.

Pembangunan negara adalah gambaran dari keinginan yang terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata dan adil serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis. Pajak, retribusi, pinjaman, keuntungan BUMN/BUMD, dll. adalah contoh sumber penerimaan Negara yang berasal dari berbagai sektor dan digunakan untuk membiayai pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan umum.

Penerimaan pajak negara adalah yang paling potensial. Secara umum, karena belanja Negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun, pendapatan Negara dalam APBN harus selalu meningkat. Peningkatan pendapatan Negara tersebut baik yang berasal dari penerimaan pajak maupun non-pajak atau yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, karena pajak merupakan penyumbang penerimaan APBN terbesar, diperkirakan peningkatan akan

terjadi pada pajak. Dari tahun ke tahun, penerimaan negara terus mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan pembangunan Indonesia.

Pajak adalah sumber keuangan terbesar di Indonesia. Dengan memperbaiki dan membangun sarana publik, pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah iuran yang ditetapkan oleh undang-undang kepada negara yang tidak menerima manfaat langsung dan dapat dialokasikan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Direktorat Jendral Pajak mengubah sistem pemungutan pajak dari sistem evaluasi resmi ke sistem evaluasi pribadi pada tahun 1983. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.

Fungsi utama pajak sebagai anggaran (*budgetair*) adalah sebagai sumber pembiayaan negara yang paling besar untuk memasukkan dana ke dalam kas negara sesuai dengan undang-undang. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulerend*) dan stabilisasi redistribusi perdagangan yang membantu pembangunan infrastruktur negara. Kompasiana (www.kompasiana.com).

Pajak melakukan fungsinya untuk mendorong pembangunan nasional. Namun, masih ada banyak orang di Indonesia yang tidak membayar pajak, meskipun pajak merupakan kontribusi terbesar ke Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Ada beberapa alasan mengapa orang tidak mau membayar pajak: mereka tidak percaya pada undang-undang perpajakan dan banyak orang yang tidak percaya dengan petugas perpajakan; mereka belum patuh karena mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dianggap ribet; atau mereka akan membayar pajak jika mengisi SPT jauh lebih murah.

Di era saat ini, pengetahuan perpajakan sangat penting bagi semua wajib pajak, baik badan maupun individu. Ini disebabkan oleh berkembangnya dunia usaha saat ini. Dalam upaya mengumpulkan dana untuk pembangunan dan menjadikan Indonesia sebagai wajib pajak yang patuh, sadar, dan berdedikasi, Dirjen Pajak mengeluarkan berbagai peraturan perpajakan baru.

Pajak melakukan dua peran penting dalam ekonomi suatu negara, menurut Siti Resmi (2013). Pertama, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan sosial ekonomi pemerintah.

Baik dalam jumlah nominal maupun persentase, pajak telah meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Sebaliknya, persentase Wajib Pajak sangat kecil dibandingkan dengan total populasi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak orang Indonesia masih rendah.

Menurut Widayati dan Nurlis, yang dikutip dalam penelitian Ramadiansyah, Sudjana, dan Dwiatmanto (2014), ada beberapa jenis kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak, salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak adalah cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami aturan pajak karena ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama Wajib Pajak, untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Masruroh Siti & Zulaikha (2013), yang menemukan bahwa memahami dan memahami aturan pajak merupakan kewajiban para petugas pajak untuk mengetahui dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Disisi lain pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti: belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari

tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya: dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Bagi suatu negara, generasi muda adalah akar dari bangsa tersebut. Pemuda adalah potensi yang sangat besar dan masih mudah untuk dibentuk agar dimasa depan mereka bisa menjadi perantara yang membawa Indonesia ke puncak kejayaannya. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak maka negara ini tidak bisa terus bergerak maju dikarenakan tidak ada adanya dana. Apabila di masa lalu pahlawan adalah mereka yang memegang tombak dan pedang untuk berjuang meraih kemerdekaan, maka sekarang pahlawan adalah mereka yang mau membayar pajak untuk menjaga eksistensi dari negara ini dan juga mereka yang mau berkarya agar bangsa ini diakui dan dihormati oleh bangsa lain. (www.pajak.go.id)

Dewasa ini, banyak sekali orang-orang yang masih belum mengerti tentang pajak dan juga tidak senang dengan pajak, sejatinya mereka hanya tidak mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayarnya. Oleh karena itu pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan sejak dini untuk membentengi masyarakat dari *stereotype* pajak yang buruk dan salah, pembekalan semacam ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga misalnya, orang tua bisa memberikan pemahaman kepada anak bahwa kemudahan akses yang dimiliki keluarga, ketercukupan Sumber Daya Alam, dan juga banyaknya penyedia kebutuhan sehari-hari adalah hasil dari ayah yang membayar pajak setiap bulannya. Dari lingkungan keluarga inilah anak akan memahami bahwa sebenarnya uang yang kita bayarkan setiap bulannya adalah untuk kebutuhan kita sendiri. Pada saat anak berada di lingkungan sekolah, guru bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa karena pajaklah mereka bisa menikmati fasilitas sekolah karena bangunan sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, dana operasional sekolah dan juga gaji dari guru-guru mereka berasal dari uang pajak yang dibayarkan warga negara yang taat membayar pajak.

Dari lingkungan masyarakat, anak-anak bisa belajar bahwa fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat adalah hasil dari uang pajak yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang akan berguna untuk masyarakat luas karena bisa menjadi jembatan untuk tercapainya pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Uang pajak yang berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan disalurkan keseluruhan instansi dan akan

digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan juga untuk membiayai operasional kantor-kantor pelayanan publik dan untuk membayar gaji ASN yang sudah bekerja untuk negara ini.

Direktorat Jenderal Pajak telah banyak membuat program yang digunakan untuk memberikan pengetahuan yang mendasar tentang pajak kepada anak usia dini, contohnya Pajak Bertutur dan juga *Tax Goes to School* atau *Tax Goes to Campus*. Pajak Bertutur sendiri adalah program Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya peran pajak di sektor pembangunan dengan menargetkan 2.000 lembaga Pendidikan baik SD, SMP, SMA, dan Universitas di seluruh Indonesia. Sementara *Tax Goes to School* adalah Program Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan juga Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengenalan tentang pajak kepada anak-anak usia dini karena merekalah generasi muda bangsa ini dan mereka harus mengenal pajak dengan baik, karena merekalah kelak yang akan menjadi konsumen akbar dan lading potensi perpajakan. *Tax Goes to School* tidak efektif jika anak-anak diberi pengetahuan pajak yang langsung berat dan bersifat formal, jadi *Tax Goes to School* harus bersifat fun tapi tetap mengedukasi, *Tax Goes to School* berfokus pada penjelasan manfaat pajak yang bisa dirasakan mereka sejak dini. Melalui *Tax Goes to School*, Direktorat Jenderal Pajak bisa meminimalisir *Free Rider* yang hanya ikut menikmati fasilitas publik tapi tidak berkontribusi kepada negara. Acara ini dilakukan agar pelajar tidak buta pengetahuan pajak saat terjun ke dunia kerja karena banyak instansi dan perusahaan yang akan memberikan syarat kepemilikan NPWP kepada calon karyawannya. Tidak hanya itu, jika pelajar berupaya untuk membuka usaha sendiri maka mereka juga memerlukan NPWP untuk menjalankan usaha mereka dan bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang perlu ditekankan adalah apabila mereka telah memiliki NPWP maka mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan, harta dan SPT Tahunan mereka. Saat mereka memiliki NPWP mereka harus mengerti hak dan kewajibannya, apabila mereka telah mengerti hak dan kewajibannya maka Direktorat Jenderal Pajak akan membantu urusan mereka juga.

2. MASALAH, TARGET DAN LUARAN

Masalah

Mitra kami adalah suatu sekolah SMA dimana pelajar perlu pengetahuan lebih mengenai pajak. Maka kami dari tim dosen akan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan pajak, sehingga tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pelajar sebagai generasi muda bangsa untuk memberikan pengenalan tentang pajak.

Mitra kami adalah pelajar SMA yang belum memahami kegunaan pajak bagi pembangunan Negara, Maka Kepala SMA Negeri 13 Makassar meminta kami selaku team dosen Ekonomi agar dapat membantu mereka dalam memberikan pengenalan tentang pajak. Berdasarkan analisis situasi di atas, prioritas permasalahan mitra kami adalah:

1. Bagaimana memahami kegunaan pajak bagi pembangunan Negara?
2. Bagaimana mekanisme pajak sebagai pendanaan Negara?

Target

Adapun target yang ingin dicapai dalam aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan yaitu:

1. Pelajar SMA Negeri 13 Makassar memahami pendapatan dan pengeluaran Negara.
2. Pelajar SMA Negeri 13 Makassar dapat mengenal, memahami, dan mentransfer pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak sebagai keikutsertaan rakyat sebagai warganegara dalam membangun bangsa.
3. Para guru SMA Negeri 13 Makassar agar dapat menambah pengetahuan dan dapat mentransfer pengetahuan bagi peserta didiknya.
4. Para dosen Program Studi Manajemen UPA agar dapat melaksanakan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Luaran

Luaran dari kegiatan PkM ini adalah membuka wawasan pelajar SMA Negeri 13 Makassar untuk memahami manfaat pajak bagi pembangunan bangsa dan satu (1) artikel yang diterbitkan pada jurnal PkM yang telah terakreditasi nasional.



Gambar 1. Peta Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat

3. METODE PELAKSANAAN

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan ini dikemas dalam bentuk ceramah dan tanya jawab langsung. Materi ceramah disajikan dalam bentuk presentasi PowerPoint, dan sesi tanya jawab dilakukan untuk memperjelas materi bahasan dan menarik perhatian peserta.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk persiapan sosialisasi dan pertemuan penyuluhan untuk siswa siswi dari tim dosen. Persiapan sosialisasi dimulai dengan tim dosen datang ke tempat mitra untuk membicarakan masalah atau kendala. Selain itu, kami akan menentukan waktu dan metode yang akan digunakan untuk penyuluhan tersebut. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan
 - a. Pada awal kegiatan Tim PkM memberikan pretest pada peserta untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pajak.
 - b. Materi penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah variatif dan interaktif menjelaskan konsep pajak secara luas dan menyeluruh, pemberian materi oleh narasumber antara lain:

Tabel 3.1 Pemateri Kegiatan Penyuluhan Pajak

No	Pemateri	Materi
1	Dr. Nurmiati, S.P., M.M., M.S.i.	Pengertian dan Jenis Perpajakan
2	Dr. Ridwan, S.E., M.M.	Fungsi Pajak bagi Negara Manfaat
3	Dr. Ilham, S.P., M.M.	Pajak bagi Masyarakat Kebijakan
4	Murbayani S.T., M.M., M.T.	Kenaikan Pajak 12%
5	Ismail, S.E., M.M.	Tata Cara Pembayaran Pajak

2. Tahap Hasil

Pada tahap hasil tim melakukan analisis atas jawaban post test yang diberikan pada siswa saat pelaksanaan. Tim juga menjelaskan manfaat pelaksanaan serta luaran yang merupakan dampak dari kegiatan PkM dosen bagi siswa SMA Negeri 13 Makassar.

B. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada :

Hari / Tgl. : Jumat, 17 Januari 2025

Waktu : Pukul 09. 00 s/d 11.00 WITA

Dengan rincian sebagai berikut:

Pukul 09.00 – 09.15 Registrasi

Pukul 09.15 – 09.30 Sesi I diisi dengan PreTest

Pukul 09.30 - 10.30 Sesi II diisi dengan Penyuluhan Pajak

Pukul.10.30 – 10.45 Sesi III diisi dengan Post Test Pukul.10.45 –

11.00 Sesi IV diisi dengan Tanya Jawab.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan penyuluhan pajak ini disinyalir dapat meningkatkan pemahaman peserta dengan cukup baik atas pengetahuan pajak secara umum. Adapun ringkasan peningkatan tersebut disajikan dalam informasi berikut:

Tabel 3.2. Evaluasi Pengetahuan Pajak Peserta

No	Materi	Pre Test (%)	Post Test (%)
1	Pengertian dan Jenis Perpajakan	35%	90%
2	Fungsi Pajak bagi Negara Manfaat Pajak bagi Masyarakat Kebijakan	40%	86%
3	Kenaikan Pajak 12%	43%	99%
4	Tata Cara Pembayaran Pajak	20%	85%
5		20%	70%

Sumber : Hasil olah data, 2025

Berdasarkan hasil pengamatan tim PKM pada saat kegiatan berlangsung, animo pelajar terhadap materi yang diberikan sangat tinggi. Antusiasme peserta dan rata-rata peserta aktif dalam mengikuti menyimak materi penyuluhan. Pengamatan ini ditunjukkan dengan rasa ingin tahu pelajar yang tinggi sehingga banyak pertanyaan yang dilontarkan pada narasumber. Keaktifan narasumber yang juga melontarkan pertanyaan pada pelajar sejauhmana mereka mengenal perpajakan ditunjukkan dengan hasil post test menunjukkan tanggapan sebanyak 90% pelajar menyatakan mereka paham pajak dan sadar akan kewajiban sebagai wajib pajak. Tanggapan posttest di atas merupakan implikasi dan manfaat dari pelaksanaan yang pada awal pertemuan pelajar diberikan pre-test yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perpajakan.

Luaran dari kegiatan ini pelajar dapat memahami pajak dan sadar pajak sejak dini dalam pendidikan. Pada akhir sesi tergambar jelas bahwa peserta mulai memaknai penting pajak dalam kehidupan sejak dini, dapat dirangkum dalam pemahaman konsep pajak dan paham pajak dalam pendidikan. Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan penyuluhan, maka manfaat dari penyuluhan berguna untuk (1) Mengembangkan pengetahuan dan wawasan perpajakan bagi pelajar. (2) Memacu semangat peserta untuk selalu mau belajar dengan memberikan pembelajaran untuk memulai sadar membayar pajak, dan (3) mengembangkan kemampuan dosen sehingga terus meningkatkan daya kreatifitas untuk dapat direalisasikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai implementasi memenuhi tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pelajar memaknai pajak semua ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam perpajakan yang tertuang dalam UU Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas UU Nomor 6 tahun 1983 dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 menyatakan orang pribadi dan badan wajib dan memaksa untuk memberikan kontribusi kepada Negara berdasarkan peraturan UU perpajakan masyarakat tidak memperoleh timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk rakyat". Selama ini pelajar awam dunia pajak dan jenis-jenisnya.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 berisi pajak daerah dan retribusi daerah termaktup di dalamnya daftar berbagai pajak provinsi dan pada Kabupaten atau Kota berikut jenis pajaknya. Dalam konteks *nation and character building*, pendidikan kesadaran pajak yang diinkluskikan ke dalam mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki fungsi dan peran penting, antara lain sebagai upaya untuk mengembangkan kesadaran pajak dalam diri peserta didik. Pendidikan kesadaran pajak saling menguatkan dengan rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang bersumber dari nilai dan moral Pancasila. Dalam konteks ini, pendidikan kesadaran pajak yang inklusif dalam mata pelajaran diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan keadaban warga negara yang sadar pajak (*civic virtue*).

Bukti nyata bahwa pajak sangat berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut berperan aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan karena hasil penerimaan pajak sdibukukan sebagai salah satu penerimaan dalam APBN yang kemudian didistribusikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Instansi/Badan dan pihak lainnya untuk membiayai belanja rutin pemerintahan (termasuk gaji dan tunjangan pegawai), proyek pembangunan, subsidi, pembayaran hutang, bantuan sosial, dan lain sebagainya. 80% penerimaan negara bersumber dari pajak dan 20% dari APBN diperuntukkan bagi anggaran pendidikan (Kompas.Com).

Langkah pemerintah untuk mewujudkan program tersebut dengan membuat kesepakatan kerja antara Kementerian Keuangan dengan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kesepakatan kedua belah pihak tertuang dalam Nomor *MoU- 21/MK.03/2014 dan Nomor: 13/X/NK/2014* tentang Peningkatan Kesadaran Pajak melalui Pendidikan, dan Nota Kesepahaamaan Nomor: *MoU- 4/MK.03/2016 dan Nomor: MoU-7/M/NK/2016* tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan melalui Riset Dikti. Hal lain yang dilakukan untuk mendukung inklusi yang ditetapkan, kedua lembaga ini melaksanakan kegiatan pelatihan bagi tenaga pelatih (*TOT*) peserta merupakan utusan dari pegawai Ditjen Pajak dan utusan dari Kemenristek Dikti yaitu dosen/tenaga pendidik.

Hasil kegiatan *Trainers of Trainers (TOT)* merupakan implementasi dari kesepakatan yang disepakati memberikan pelatihan dosen dari berbagai perguruan tinggi masing-masing lingkungan L2Dikti sesuai dengan materi pembelajaran yang diperoleh selama masa pelatihan. Melalui kegiatan-kegiatan serupa yang dilakukan berbagai pihak, dalam decade 20 tahunan ke depan diharapkan bermunculan relawan pajak yang memperjuangkan gerakan sadar pajak yang dimotori anak-anak muda dan kaum terpelajar. Seiring munculnya ormas maupun organisasi politik yang mendukung gerakan tersebut. Diprediksi sadar pajak dapat mencapai puncak optimalisasi pada sekitaran 40 tahunan yang akan datang akan tiba masanya iuran wajib sebagai kebutuhan bagi seluruh warga bukan lagi menjadi beban. Dalam sistem Pencapaian membentuk aspek perpajakan yang terintegrasi dengan baik dalam sistem kehidupan bermasyarakat bangsa sesuai kepribadian bangsa.



Gambar 2 Dokumentasi Pelaksanaan PkM

Pembahasan

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan bukan saja berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya dalam meningkatkan pemerataan pendidikan dan mutu Pendidikan

Pada era globalisasi saat ini masyarakat Indonesia dituntut untuk menjadi masyarakat yang berpendidikan, untuk menguasai berbagai hal dan kemampuan. Selain itu dapat memberikan dan meningkatkan kemampuan adalah dengan bersekolah atau masuk suatu lembaga pendidikan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di segala bidang, terutama bidang Pendidikan. Saat ini

masyarakat mungkin belum merasakan secara langsung manfaat pemungutan pajak untuk bidang pendidikan, sebab pemerintah baru membebaskan biaya sekolah pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Untuk tingkat perguruan tinggi bahkan terkesan pemerintah mau lepas tangan dari kewajibannya. Diharapkan di masa depan pemerintah dapat mengupayakan peningkatan anggaran dengan melakukan upaya peningkatan efisiensi dalam sistem pendidikan, strukturisasi anggaran, dan prioritas alokasi anggaran yang memacu prestasi belajar pelajar, sehingga pada akhirnya dapat dicapai peningkatan sumberdaya manusia Indonesia lewat pendidikan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi informasi berkembang sangat pesat. Dengan pengetahuan dan teknologi informasi yang terus berkembang, diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak dan membantu memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Oleh karena itu, peran penting pelajar sebagai generasi muda tersebut harus dibekali dengan sikap integritas yang tinggi, karena integritas saat ini merupakan hal yang sangat mendasar bagi mereka untuk melanjutkan pembangunan yang bermartabat.

Integritas sudah menjadi isu penting saat ini, karena masalah integritas tidak hanya menjadi permasalahan di Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi di semua lini perpajakan seperti konsultan pajak, pemilik-pemilik perusahaan, para wajib pajak pun turut serta mendukung sikap integritas, bukan menjadi bagian dari para penghindar pajak. Generasi milenial juga merupakan terminologi generasi yang sekarang hangat dibahas di mana-mana, dan di tangan mereka lah diharapkan inklusi kesadaran pajak terwujud secara menyeluruh ke pelosok nusantara.

Hal ini dapat terlihat dari upaya-upaya kami dalam mensosialisasikan kepada SMA Negeri 13 Makassar, agar dapat membangun para pemuda dan pemudi dalam membantu penerimaan negara dengan memadukan ide-ide kreativitas serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah gambaran hubungan penerimaan pajak sebagai pembangunan negara dengan dukungan masyarakat dari setiap lapisan.

Salah satu program yang dilakukan adalah penyuluhan pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE -98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan direktorat jenderal pajak, penyuluhan pajak diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penyuluhan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kesadaran, meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang, selain itu penyuluhan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Banyak hal positif yang ditanamkan dalam kegiatan tersebut. Salah satunya merubah paradigma membayar pajak karena paksaan menjadi bangga karena sudah taat pajak. Karena masyarakat harus sadar bahwa dengan taat pajak berarti masyarakat telah menjadi pahlawan di Negeri ini. Di masa sekarang pahlawan bukan hanya yang bertopeng, dengan taat membayar pajak kalian sudah bisa dikatakan pahlawan karena membantu membangun Negara Indonesia yang diketahui 85 persen pendapatan Negara berasal dari penerimaan pajak. Masyarakat yang telah taat pajak harus bangga karena telah berkontribusi langsung kepada Negara Indonesia. Maka dari itu, mari ber sama-sama membangun Negara menjadi lebih baik dengan taat pajak. mari bersama-sama menjadi generasi yang sadar akan pajak dan melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. Karena pajak untuk kesejahteraan kamu dan ratusan juta penduduk Indonesia.

Kegiatan ini akan menambah kesadaran masyarakat akan pajak akan membawa dampak positif yang tidak hanya ke pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat. Pemerintah

membutuhkan pajak dari masyarakat sebagai sumber untuk memenuhi penerimaan anggarannya dan sebagai balasannya pada masyarakat, pemerintah memberikan beragam fasilitas umum, infrastruktur, subsidi, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kesadaran masyarakat akan pajak itu penting bagi pemerintah, dan juga masyarakat.

Pemberian edukasi pajak untuk anak SMA juga dalam rangka mempersiapkan mereka yang sebentar lagi akan menghadapi dunia kerja karena tidak semua lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, banyak juga selepas lulus sekolah menengah langsung bekerja atau berwirausaha. Ketika mereka bekerja menerima penghasilan atau gaji, dan jumlahnya di atas PTKP ada kewajiban bagi mereka untuk lapor pajak. Keterlibatan sekolah juga dipilih untuk mengedukasi masyarakat bahwa urusan pajak itu bukan hanya urusan orang akuntan atau ekonomi, semua warga negara tidak melihat keilmuannya atau bidang kerjanya apa selama dia memperoleh penghasilan yang memenuhi kriteria akan menjadi wajib pajak dan memiliki kewajiban perpajakan, salah satunya lapor pajak. Melihat respon positif dari target, kegiatan ini tidak akan berhenti di sekolah ini saja, tetapi akan dilanjutkan secara berkala ke sekolah-sekolah lain, dan juga jenjang lain. Dengan rangkaian kegiatan ini diharapkan generasi muda Indonesia akan melek pajak sejak dini dan berdampak pada meningkatnya kesadaran pajak yang ujungnya kepatuhan pajak dan terciptanya penerimaan negara yang berkelanjutan (*sustainable*).

5. KESIMPULAN

Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya pemahaman pelajar SMA Negeri 13 Makassar terkait perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Dengan adanya ilmu terkait perpajakan sejak dini ini para pelajar mampu memahami tujuan serta fungsi dari pajak. Dalam proses pencapaian tujuan kegiatan pengabdian ini diperlukan adanya keingintahuan pelajar yang besar sehingga tercipta hubungan komunikasi yang baik dan berdampak pada kelancaran kegiatan penyuluhan ini. Penyuluhan semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar selain membantu pelajar SMA dapat mengenal, memahami, dan mentransfer pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak sebagai keikutsertaan rakyat sebagai warganegara dalam membangun bangsa

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada individu dan institusi berikut yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama pelaksanaan PkM ini:

1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha, atas kontribusi dan kerja keras dalam merancang dan melaksanakan program ini.
2. Pihak SMA Negeri 13 Makassar, atas kerjasama dan partisipasi pelajar dalam kegiatan ini.
3. Semua pihak yang telah memberikan saran, masukan, dan dukungan dalam proses pelaksanaan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : Se - 98/Pj/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
- H. Ibda, "Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi „Gebuk“ (Gerakan Membuat Kartu) Npwp Pada Mahasiswa," *J. Ekon. Pendidik. Dan Kewirausahaan*, Vol. 7, No. 2, Pp. 83–98, 2019, Doi: 10.26740/Jepk.V7n2.P83-98.
- Heni Agustinaa, Rizki Amalia Elfitab, Tri Deviasari Wulanc, 2023, Pengenalan Tertib Pajak Sejak Dini, Seminar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat, SN-PKM.

- Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi. [Http://Edukasi.Pajak.Go.Id/Images/Buku Pt/Materi Terbuka/BuKumtkppt2.Pdf](http://Edukasi.Pajak.Go.Id/Images/Buku_Pt/Materi_Terbuka/BuKumtkppt2.Pdf)
- Kompas.Com.(2020). Pendapatan Negara Dan Pengeluaran Negara". https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/090000769/sumber_pendapatan-negara-dan-pengeluaran-negara?page=all. Diakses: 04 Januari 2020
- L. Linawati And R. E. Putra, "Young Generation Tax Compliance As Candidates Potential Taxpayers," *J. Sci.*, Vol. 12, No. 04, Pp. 1068–1075, 2023.
- L. Linawati, "The Effect Of Religiosity, Understanding Of Taxation And Love Of Money On Perception Of Tax Evasion With Tax Education As A Moderating Variable," *J. Ekon.*, Vol. 11, No. 02, Pp. 1633–1640, 2022.
- M. S. Muhamad, M. Asnawi, And B. J. C. Pangayow, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Akunt. Dan Keuang. Drh.*, Vol. 14, No. 1, Pp. 69–86, 2019.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Jakarta: Andi Yogyakarta
- Mardlo, Amaliah, Zidni ,<https://Pajak.Go.Id/Artikel/Inklusi-Pajak-Untuk-Generasi-Emassadar-Pajak>) Diunggah Pada 01/08/2019 - 10:15
- Maulana, M. N., & Hidayatulloh, A. (2021). Sosialisasi Dan Pelatihan Perhitungan Pph Pasal 21 Menurut Undangundang No 7 Tahun 2021. *Senriabdi*, 887–893.
- Puspitasari, I., Agustina, H., Abdussalam, A., & Bustomi, A. A. (2022). Pengaruh Edukasi Pembayaran Pajak; Implementasi E-Samsat Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, 5(2), 219-229.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 7(01), 1–12.
- Rodiah, Y., & Agustina, H. (2022). Pemahaman Pelaporan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dimediasi Dengan Penerapan Fasilitas E-Filling. *Sustainable*, 2(2), 209-225.
- S. K. Rahayu, 2017, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Bandung.
- S. Resmi, 2013, *Perpajakan; Teori Dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Supriyanto, S., Susanti, S., Angraini, J., Natalia, N., Arlina, A., Mirabelle, E., & Liang, V. L. (2022). Edukasi Perpajakan Pada Pelajar SMA Negeri 15.
- Batam Demi Menciptakan Generasi Muda Sadar Pajak Sejak Dini. *National Conference For Community Service Project (Nacospro)*, 4(1), 457–463.
- V. I. Sari, 2019, Pengaruh Literasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating.
- Valianti, R. M., Lilianti, E., Saladin, H., & Darwin, J. (2021). Sadar Pajak Sejak Dini Dalam Pendidikan. *Jurnal Pkm Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 130–137.
- Y. Yusuf, I. Sofi'i, And H. Herlambang, 2023, "Sosialisasi Membangun Kesadaran Pajak Sejak Dini Di Smp Terbuka Al-Munasharah," *Nanggroe J. Pengabdi. Cendikia*, Vol. 2, No. 3, 2023.
- Y. Yusuf, L. Anthoni, And D. Fahmi, 2022, "Sosialisasi Perhitungan Pph Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Dan Pegawai Dengan Upah/Harian Dengan Metode Gross Up," *J. Abdi Masy. Multidisiplin*, Vol. 1, No. 1, Pp. 36–42, 2022.

Yusuf, Lukman Anthoni, Saksono Budi, Neng Linda Puspitasari, Jernih Eli Dekati Zandrato, 2023, Mengenalkan Pajak Sejak Dini: Upaya Edukasi Pajak Pada Remaja Di Yayasan Al-Ikhwaniyah, Limo Depok, Jammu Vol 2 No. 3 | Desember 2023 | Issn: 2829-0887 (Cetak), Issn: 2829-0496, Hal. 16-21